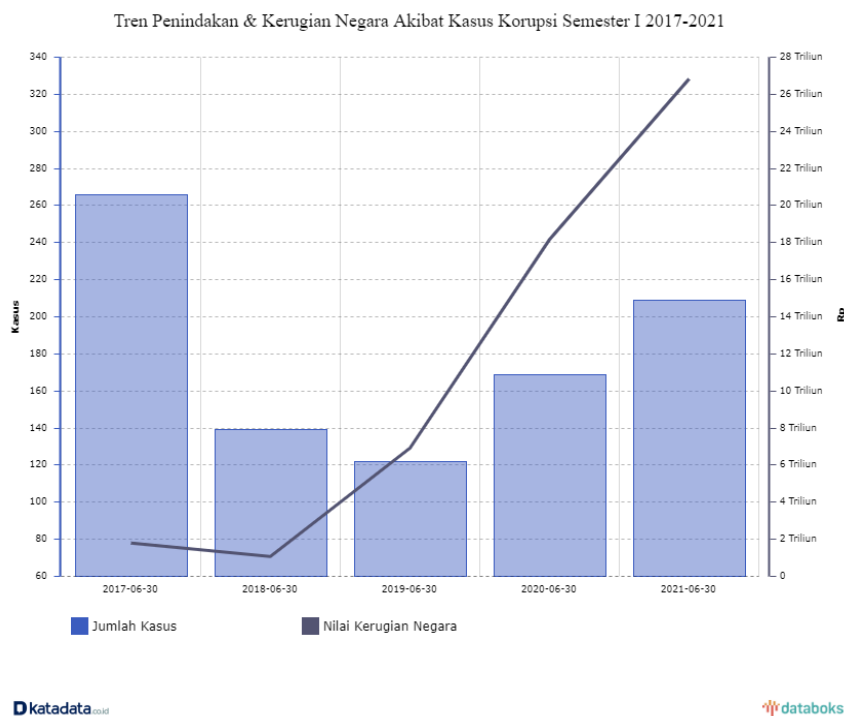


# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Berbicara tentang korupsi di Negara Indonesia, masalah yang begitu menonjol yaitu kasus mal administrasi seperti korupsi. Tantangan besar yang harus dihadapi yaitu untuk memberantas kejahatan tersebut. Menurut hasil dari survey yang telah dilaksanakan terhadap *Ltd. The Political and Economic Risk Consultancy* (2005), Indonesia masuk dalam salah satu negara terkorup di dunia. Kebanggaan terhadap Negara Indonesia semakin memudar dengan adanya kasus korupsi. Sistem Pemerintahan yang masih buruk belum berorientasi penuh untuk melaksanakan berbagai prinsip tata kelola pemerintahan yang baik.



**Gambar 1.1** Tren Kerugian Negara Akibat Kasus Korupsi 2017-2021

Sumber: *Indonesia Corruption Watch*, 2021

Berdasarkan data diatas (*Indonesia Corruption Watch*, 2021), setidaknya ada 209 kasus korupsi dengan tersangka sejumlah 482 orang yang diproses hukum dan

menyebabkan kerugian negara sebesar Rp. 26,83 T. Pada tren penindakan kasus korupsi yang dilaksanakan oleh aparat penegak hukum di tahun 2017 sampai dengan tahun 2021 ini mengarah pada fluktuatifnya data. Sedangkan tren pada nilai kerugian sedang mengalami peningkatan di setiap tahunnya.

Semakin tingginya tingkat korupsi sesuai dengan data di atas maka menurut Buku Kajian Birokrasi (Tri Yuniningsih, 2019) Lembaga Pemerintah saat ini terus menerus menggaungkan pelaksanaan Reformasi Birokrasi yang telah nyata menjadi kebutuhan bagi aparatur pemerintah dan telah berhasil menetapkan landasan politik, ekonomi dan hukum di Indonesia sebagai kehidupan yang demokratis. Harapan birokrasi di Indonesia di tahun 2024 mendatang adalah birokrasi yang berkelas dunia. Maksudnya yaitu sistem pemerintahan yang mampu menyandang aparatur yang profesional, berjiwa integritas, menguasai berbagai macam teknologi, berjiwa *hospitality* dan berkarakter *entrepreneurship*, mampu berbahasa asing serta memiliki *networking* yang luas guna menghadapi tantangan di era berjalan (Budi Prayitno, 2018). Reformasi Birokrasi muncul saat masa pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono yang saat itu menjabat sebagai Presiden RI ke-6 di tahun 2010 dan masih berlanjut sampai sekarang. Program *Grand Design* Reformasi Birokrasi dilakukan di periode 2010-2025 yang dibagi tiga (3) fase yakni pertama fase 2010-2014, kedua fase 2015-2019 dan ketiga fase 2020-2024.

Dalam Peraturan MenPAN-RB Nomor 90 Tahun 2021, (Tjahjo Kumolo, 2021) menyatakan bahwa konsep "*island of integrity*" menginspirasi terciptanya pembangunan zona integritas yaitu keadaan suatu satuan kerja pada instansi pemerintahan yang baik dapat menyediakan penataan dan pengelolaan pemerintahan yang lebih baik lagi meskipun satuan kerja sekitarnya masih banyak manajemen dan tata kelola yang buruk.

Untuk itu Pemerintah dalam melaksanakan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) menyusun berbagai aksi strategis yaitu dengan memercayakan satuan kerja yang diusulkan telah memenuhi syarat. Penetapan satuan kerja menuju WBK/WBBM ini bisa diartikan sebagai kompetisi agar menjadi wilayah percontohan dalam penerapan pelaksanaan reformasi birokrasi pada satuan kerja di

lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Kemenkumham RI). Kemenkumham RI kini memiliki komitmen tinggi dalam pelayanan pada masyarakat yang cepat, tepat, efisien dan profesional dalam mewujudkan tata kelola yang *good governance* dan *clean government* secara berkelanjutan memperbaharui dan merubah sistem penyelenggaraan pemerintah. Hal ini dilakukan demi terwujudnya layanan publik yang prima.

Upaya terwujudnya Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak harus mengacu kepada Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia (Permenkumham RI) Nomor 06 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Permenkumham RI Nomor 29 Tahun 2019 tentang Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM di Lingkungan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Melihat penjelasan serta atas dasar hukum di atas maka dianggap penting bagi penulis menyajikan dan menganalisis implementasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBBM yang telah dilaksanakan oleh Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Untuk itu penulis begitu tertarik untuk memilih dan memperdalam penelitian ini dengan judul **“Analisis Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak”**.

## **1.2 Rumusan Masalah**

Merujuk latar belakang tersebut, penulis menjadikan rumusan permasalahan terhadap penelitian ini yaitu:

1. Bagaimana kesesuaian implementasi WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dengan indikator yang ditetapkan dalam Permenkumham RI Nomor 06 Tahun 2020?
2. Bagaimana perbedaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak sebelum & sesudah meraih predikat WBK serta setelah meraih predikat WBBM?

## **1.3 Batasan Masalah**

Batasan dalam suatu permasalahan dipergunakan agar terhindar jika terdapat penyimpangan ataupun pokok permasalahan yang melebar serta agar penelitian ini

menjadi lebih terarah dan mudah dipahami maka penelitian kali ini penulis akan membatasi terkait masalah yang akan penulis teliti yakni Kesesuaian Implementasi WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak terhadap Permenkumham RI Nomor 06 Tahun 2020 serta perbedaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak sebelum & sesudah meraih predikat WBK serta sesudah meraih predikat WBBM.

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Merujuk pada rumusan masalah di atas, adapun tujuan peneliti melakukan penelitian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui kesesuaian implementasi WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak dengan indikator yang ditetapkan dalam Permenkumham RI Nomor 06 Tahun 2020;
2. Untuk mengetahui perbedaan Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak sebelum & sesudah meraih predikat WBK serta setelah meraih predikat WBBM.

#### **1.5 Manfaat Penelitian**

Selain tujuan di atas, peneliti juga diharapkan memiliki manfaat terhadap penulisan yang tertuang pada penelitian kali ini, antara lain:

1. Bagi Perusahaan  
Diharapkan hasil yang ada dijadikan sebagai bahan referensi informasi yang digunakan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik melalui analisis WBBM di Kantor Imigrasi Kelas I TPI Tanjung Perak. Selain itu penelitian ini juga berguna menjadi masukan dalam menerapkan reformasi birokrasi yang ada pada perusahaan.
2. Bagi STIAMAK Barunawati Surabaya  
Peneliti berharap hasil penelitian ini mampu wawasan serta pengetahuan untuk mahasiswa dalam berpikir ilmiah, menambah literatur perpustakaan sehingga bermanfaat untuk semua pihak, sekaligus dapat menerapkan teori dalam bidang pelayanan publik khususnya mengenai WBBM.

### 3. Bagi Peneliti

Hasil yang tertuang dalam penelitian ini dapat menjadi tambahan sumbangan wawasan serta pengetahuan. Pemahaman penulis (peneliti) tentang WBBM bertambah dan peneliti berharap bisa sebagai bahan untuk mempertimbangkan dalam penelitian selanjutnya.

## 1.6 Sistematika Penulisan

Agar mempermudah dalam mengartikan pemahaman penulisan ini, maka perlunya peneliti untuk menyusun penulisan dengan rangkaian sebagai berikut:

### 1. **BAB I PENDAHULUAN**

Bab ini menjelaskan mengenai penyebab (latar belakang) permasalahan yang diangkat peneliti pada pokok pembahasan. Latar belakang ini menjadikan penelitian sebagai sebuah acuan dan landasan dalam meneliti pokok permasalahan. Penyusunan rumusan masalah dan batasan masalah menjadikan arah fokus sebuah penelitian tidak menyimpang dari rumusan masalah. Selain itu adanya tujuan dan manfaat dalam pencapaian sebuah penelitian agar diketahui *outputnya*. Serta adanya sistematika pada penulisan yang berisi uraian yang singkat mengenai proses pada penulisan ini jadi lebih terarah.

### 2. **BAB II LANDASAN TEORI**

Seluruh teori yang mendukung dan berhubungan dengan pembahasan penelitian tertuang dalam bab ini. Landasan teori diperkuat untuk menunjukkan hasil pada penelitian sebelumnya. Berbagai teori bisa diperoleh dengan bermacam-macam referensi dari buku dan sumber informasi lain yang terkait dalam bahasan penelitian.

### 3. **BAB III METODE PENELITIAN**

Dalam bab ini dijelaskan mengenai tahapan-tahapan yang dikerjakan oleh penulis dalam menganalisis penelitian dan penyusunan pada laporannya. Agar hasil tepat sasaran, maka perlu tahapan yang jelas, terstruktur dan terarah. Sehingga tujuan awal penelitian tidak menyimpang dari hasil penelitian tersebut.

4. **BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN**

Bagian ini menjelaskan mengenai analisa dari hasil interpretasi peneliti dalam mengerjakan sebuah pengamatan, pengumpulan dan pengelolaan data hingga hasil yang tercapai selama proses penelitian berlangsung.

5. **BAB V PENUTUP**

Bagian ini menjelaskan tentang simpulan dari inti pembahasan yang diikuti dengan memberikan saran dari berbagai pihak terkait guna memperbaiki / meminimalisir kekurangan yang ada dan juga sebagai perkembangan ilmu pengetahuan dimasa yang mendatang.